

Survei: 82,2 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 06/02/2025



ORINEWS.id – Konsistensi dalam menjalankan janji kampanyenya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, menjadi satu aspek yang membuat tinggi citra positif Presiden [Prabowo Subianto](#)

Hal tersebut disampaikan peneliti utama The Republic Institute, Sufyanto dalam rilis hasil survei lembaganya secara daring pada Kamis, 6 Februari 2025.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil surveinya pada medio 18 hingga 25 Januari 2025, dari 1.400 responden survei yang dilakukan wawancara tatap muka di seluruh provinsi Indonesia, mayoritas menilai positif kinerja pemerintahan Presiden [Prabowo](#) Subianto dan Wakil Presiden [Gibran Rakabuming Raka](#).

“Ada 82,2 persen menyatakan sangat puas dan puas. Berikutnya, ada tidak puas dan kurang puas 17 persen,” ujar Sufyanto.

Menurutnya, angka 82,2 persen untuk citra positif pemerintahan

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran termasuk yang terbilang tinggi.

“Jadi artinya sangat diterima masyarakat,” sambungnya menjelaskan.

Sufyanto memaparkan, responden yang puas memiliki sejumlah alasan memberikan penilaian positif kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama adalah karena merasakan dari janji kampanye yang diwujudkan.

“Yang puas itu ternyata dari 82,2 persen itu kami tanyakan, kenapa puas menjawab? Sebagai contoh, 23,2 persen menyatakan Presiden konsisten dengan janji dan program yang dibawa saat kampanye,” urainya.

Selain itu, Sufyanto juga mengungkapkan alasan lainnya yang membuat masyarakat puas kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Yakni, terkait dengan karakteristik kepemimpinan.

“Jadi memang Presiden Prabowo yang menampilkan karakter tegas dan berani mendapat respon positif dari masyarakat,” sambungnya menjelaskan.

Sementara bagi yang tidak puas, The Republic Institute mendapati beberapa alasan yang juga karena dirasakan langsung oleh masyarakat, dan bahkan termasuk yang paling besar.

“Ada 17 persen yang kurang puas kenapa? Kita mendapat data ada 25,7 persen berdampak karena harga sembako masih tinggi, bantuan pemerintah tidak adil dan merata sebanyak 22,1 persen,” paparnya.

“Ini mungkin memang yang tergambar di masyarakat para petugas atau penyampai bantuan di desa kurang cermat. Misalnya basis keluarga yang mendapat tidak objektif dinilai,” demikian Sufyanto menambahkan.

Dalam survei ini, The Republic menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,6 persen dan

tingkat kepercayaan 97,4 persen.

Adanya fenomena kebijakan larangan LPG 3 Kg dijual di pengecer yang dirancang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ternyata tidak mempengaruhi kepuasan publik ke Prabowo.

Sebaliknya justru rakyat mengapresiasi Prabowo yang membatalkan kebijakan Bahlil tersebut.[source:rmol]